

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Alma, Buchari, 2012, *Pengantar Bisnis*, Allfabeta, Bandung.
- Armansyah, Koesparmono Irsan, 2016, *Hukum tenaga Kerja: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Azwar, Sifuddin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Djumaldi, 2008, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Manulang, Sendjun, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamdi, Asep Saepul 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam pendidikan*, Deepublish, Yogyakarta.
- Hanitijo, Ronny, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hersutanto, Begi, 2009, *Makna Negara Kepulauan*, Badan Koordinasi Keamanan Laut, Jakarta.
- Husni, Lalu, 2016, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Indonesia, Geomaritime, 2015, *Kajian Histori Sumberdaya dan Teknologi Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, Badan Informasi Geospasial, Bogor.

- International Labour Organization, 1999, *Pengupahan (Wages)*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.
- Kertonegoro, Sentano, 2001, *Pengupahan: Teori, Hukum dan Manajemen*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta.
- Khakim, Abdul, 2006, *Aspek Hukum Pengupahan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Hadjon., Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Maimun, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan: Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moekijat, *Administrasi Gaji dan Upah*, Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakt., Bandung
- Prihartono, Bambang, 2015, *Konsep Tol Laut dan Implementasi 2015-2019*, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Jakarta
- Purwosutjipto, 2000, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku Ke-5*, Djambatan, Jakarta.
- Rusli, Hardijan, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soedjono, Wiwoho, 1987, *Hukum Perjanjian Kerja Laut*, Bina Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, 2010, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Tim PresidenRI, 2019, *2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: Akselerasi Mewujudkan Indonesia Sentris*, Kantor Staf Presiden RI, Jakarta.

Triyanto, Djoko, 2005, “*Bekerja di kapal*”, Mandar Maju, Bandung.

### **Peraturan PerUndang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4849).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention*, 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5931).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5747).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549,)

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor: HK. 103/3/13/DJPL-18 Tentang Tata Cara penerbitan Serifikat Ketenagakerjaan Maritim.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/68 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

## Jurnal

Adam, Lukman, “Kebijakan Konektivitas Maritim Di Indonesia”, *Pusat Pengkajian, Pengelolaan dan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI*, Vol.2, 25 Maret 2015.

Cahyadi, Trip, “Perlindungan Hukum Pelaut Di Kapal Indonesia Berbasis Nilai Keadilan”, *PIP Semarang*, Vol IV No. 1 Januari-April 2017.

Darma, Susilo Andi, “Kedudukan Hubungan Kerja: Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan dan Sifat Hukum Publik dan Privat”, *Mimbar Hukum*, vol. 29, Nomor 2, Juni 2017.

Eka Wati, Tri Iriani “Analisis Tingkat Implementasi Jam Kerja dan Jam Istirahat di Kapal yang Berbendera Indonesia (*Studi kasus di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Makassar*)”, *Jurnal Venus* volume 05 Nomor 10, Desember 2017

Farah, Nina, “Perlindungan Pelaut Indonesia Di Luar Negeri Melalui Ratifikasi Maritime Labour Convention 2006”, *Juris-Diction Airlangga*, Volume 1 No. 2, November 2018.

Muhiddin, Nurmiati, “Efektivitas Perjanjian Kerja Laut Terhadap Keselamatan Kerja Anak Buah Kapal (ABK)”, *Jurnal Al-Daulah Publish*, Vol 5, No. 1, Juni 2016.

Nasution, Herwin, “Dampak Pemberlakuan Kebijakan MLC 2006 Terhadap Keberadaan Pelaut Serta Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Pelaut”, *Seminar Nasional Kelautan XI*, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Surabaya, 2 Juni 2016.

Wati, Salma, “Kepentingan Indonesia Tidak Meratifikasi *Maritime Labour Convention* (MLC) Tahun 2006-2014”, *Jom FISIP*, Volume 1 No 2 Oktober 2014.

## Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Andyana, Ivone Putri, 2008, “Perlindungan Hak-Hak Bagi Awak Kapal Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Arresman, Rijen, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal Menurut *Maritime Labour Convention* 2006 dan Implementasi di Indonesia”, *Skripsi*, Universitas Andalas, Padang.

Fourmansyah, 2016, “Tinjauan Yuridis Terhadap Standar Upah Pelaut Pada Kapal Berbendera Indonesia Secara Nasional”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Ginting, Robi 2018, “Legitimasi Penerapan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Pekerja Lokal Dengan Kedutaan Besari di Indonesia: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 376 k/PDT.SUS-PHI/2013”, *Skripsi*, Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Nurnaningrum, Tessa Yulisa Dewi 2016, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Penangguhan Pembayaran Upah Minimum Di PT. Samites Sewon Bantul”, *Skripsi*, Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Putra, Ade Roni Zaeni 2017, “Perlindungan Terhadap Hak Upah Pekerja dan Keberlanjutan Bisnis Pelaku Usaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat”, *Skripsi*, Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

## Internet

Bisnis.com, “Indonesia Miliki Pelaut Terbanyak di Dunia”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180227/98/743607/Indonesia-miliki-pelaut-terbanyak-nomor-2-di-dunia>.

DetikFinance, “Menteri Susi Ingin Gaji ABK Kapal Ikan di Atas UMP”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2845967/menteri-susi-ingin-gaji-abk-kapal-ikan-200-di-atas-ump>.

Indonesia National Shpowners Association, “Peranan Transportasi Laut Untuk Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”, <https://insa.or.id/insa-di-fgd-peran-transportasi-laut-untuk-mendukung-indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia/>.

Indoseafarers, “Penyakit berbahaya dan serius di lingkungan pelaut”, <https://indoseafarers.com/berprofesi-sebagai-pelaut-ini-5-penyakit-berbahaya-dan-serius-yang-perlu-kamu-ketahui/>.

Julista, Lidya, “Pengusaha: 90% Perdagangan International Melalui Jalur Laut”, <https://economy.okezone.com/read/2017/01/19/320/1595529/pengusaha-90-perdagangan-internasional-melalui-jalur-laut>.

M. Ridhwan, Masagus, “Analisis Neraca Jasa: Studi Kasus Industri Transportasi Maritim”, *Working Paper Bank Indonesia*, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/wp/Documents/WP-BI-No.4-2016-Jasa-Maritim.pdf>.

Maritime News, “Pelaut Senior Sambut Ratifikasi MLC 2006 menjadi UU No 15 Tahun 2016”, <http://maritimnews.com/2016/11/pelaut-senior-sambut-ratifikasi-mlc-2006-menjadi-uu-nomor-15-tahun-2016/>.

Mongabay Situs Berita Lingkungan, “Benarkan Perlindungan Pemerintah pada ABKIndonesiaTidakMaksimal”, <https://www.mongabay.co.id/2018/10/05/benarkah-perlindungan-pemerintah-pada-abk-Indonesia-masih-tidak-maksimal/>.

## Konvensi Internasional

*Maritime Labour Convention 2006*